

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (SAK, 2004). Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi (Astria, 2011).

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan keuangan ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan, diantaranya adalah pihak manajemen. Untuk menilai integritas informasi laporan keuangan yang disajikan, peranan dewan komisaris dalam perusahaan publik melakukan pengawasan dan menjamin tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) guna menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu (Jam'an, 2008).

Financial Accounting Standar Board (FASB) dalam Statement of Financial Accounting Concept No.2 (SFAC NO.2) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi yang disediakan melalui pelaporan keuangan dan berbagai penjelasan yang digunakan sebagai laporan. Informasi akuntansi merupakan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal perusahaan sebagai pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya untuk menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan keuangan ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan, diantaranya adalah pihak manajemen. Untuk menilai integritas informasi laporan keuangan yang disajikan, peranan dewan komisaris dalam perusahaan publik melakukan pengawasan dan menjamin tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) guna menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu.

Laporan keuangan merupakan media informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi para penggunanya untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Misalnya, investor yang ingin menanamkan modalnya, atau pemerintah yang ingin

mengetahui kinerja perusahaan negaranya sehingga dapat memberikan anggaran dana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain investor dan pemerintah, laporan keuangan juga diharapkan dapat berguna untuk manajemen dalam mengambil keputusan bisnis, debitur atau kreditur untuk melakukan kerjasama, maupun masyarakat luas sebagai konsumen atas produk perusahaan.

Laporan keuangan merupakan cerminan tanggung jawab apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009) dalam Deni (2005). Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, 2009) dalam Deni (2005).

Untuk dapat bermanfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2009) dalam Deni (2005). Laporan keuangan harus menggunakan bahasa dan istilah yang dapat dipahami oleh para penggunanya agar tidak terjadi interpretasi yang salah atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Laporan keuangan juga harus disajikan secara jujur dan wajar, bebas dari bias, dan tidak menyesatkan sehingga dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus lengkap dan netral, tidak memihak kepada siapa pun. Kemudian, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan agar pengguna dapat mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan perusahaan (Wahab, 2011).

Faktor pertama yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah struktur *corporate governance*. Struktur *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007) dalam hardianingsih (2010).

OECD (2005) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Menurut Frost dkk. (2002), perbaikan dalam praktik *corporate governance* yang berkontribusi terhadap pengungkapan yang lebih baik dalam pelaporan bisnis, nantinya dapat memberikan fasilitas market *liquidity* dan *capital formation* yang lebih besar di pasar negara berkembang. Hal ini menunjukkan *corporate governance* mengatur pembagian tugas dan kewajiban yang berkepentingan terhadap perusahaan termasuk pemegang saham, komisaris, para manajer, dan stakeholder.

Dalam prakteknya, penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan

sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Darmawati 2004) dalam Habibe (2012)

Konsep *good corporate governance* (GCG) sesungguhnya telah lama dikenal di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika, dengan adanya pemisahan antara pemilik modal dengan para pengelola perusahaan. Konsep ini menghangat di Amerika pada tahun delapan puluhan ketika muncul skandal pengambilalihan (*takeover*) dan skandal penjualan saham kepada pihak manajemen sendiri (*management buyout*) yang merisaukan pemegang saham, karena manajemen perusahaan yang diberi mandat oleh pemegang saham tidak mengelola perusahaan dengan baik, dimana ada penyalahgunaan wewenang oleh manajemen untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham. Melihat situasi ini, kalangan aktivis dan pemerhati masalah perusahaan mulai merumuskan suatu sistem agar para pengelola perusahaan bertanggungjawab (*accountable*) kepada pemegang saham dan kepada pihak yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan (*stakeholders*).

Sejauh ini di Indonesia kasus-kasus manipulasi skandal laporan keuangan, seperti PT. Lippo, Tbk dan PT. Kimia Farma, Tbk juga melibatkan pelaporan

keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi dalam kasus laporan keuangan ganda PT. Lippo, TBK atau Lippogate itu juga merupakan skandal yang sangat serius karena melibatkan bukan hanya badan swasta, tapi juga institusi-institusi yang merupakan instrumen kepanjangan tangan pemerintah, misalnya BPPN, Bapepam, Bursa Efek Jakarta (BEJ), serta Bank Indonesia (BI). Skandal Lippogate dimulai kasus laporan keuangan ganda yang semua berkategori "audited" oleh Bank Lippo pada September 2002 dan Desember 2003. www.tempointeraktif.com, dan www.bpkp.go.id (Astria, 2011).

Fenomena skandal keuangan yang terjadi juga dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan *integritas* laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Penyajian laba dalam laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang (Astria, 2011).

Good corporate governance adalah salah satu cara pandang yang inovatif, dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan tanggungjawab pemilik saham dengan pengelola usaha maupun dengan pemerintah. Semakin baik penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka akan diharapkan mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat oportunistik sehingga laporan

keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi, yaitu laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Siregar, 2006).

Jasa Raharja sebagai badan Usaha Miliki Negara, sesuai tugas pokok penyelenggaraan Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964 yang telah mendapat kepercayaan dari lapisan masyarakat dan mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness, maka disusun suatu pedoman penerapan GCG (Code of GCG) yang secara periodik di update atau dilakukan penyempurnaan dalam rangka peningkatan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang mendukung penyusunan pedoman tersebut, sehingga hasilnya lebih konstruktif dan fleksibel bagi perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik “GCG” merupakan konsistensi perusahaan “melakukan apa yang ditulis dan menuliskan apa yang dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan di PT Jasa Raharja, Jasa Raharja sudah menerapkan GCG semenjak tahun 2007. Tetapi dalam pelaksanaannya penerapan GCG belum sepenuhnya dilaksanakan/belum maksimal pelaksanaannya. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan “*Good Corporate Governance*” PT Jasa Raharja selalu dilakukan pembenahan penerapan GCG setiap tahunnya, penerapan GCG di PT Jasa Raharja selalu dilakukan evaluasi penerapannya oleh tim Kantor Pusat. Dalam prakteknya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan dan karyawannya perlu memahami dan membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Berdasarkan wawancara tersebut penerapan prinsip-prinsip GCG sangat bermanfaat terhadap

kinerja keuangan. Dengan dijalankannya prinsip-prinsip GCG tersebut diatas dapat membantu setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.

PT jasa raharja sebagai salah satu BUMN merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK (2011), hasil pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan kegiatan pada PT Jasa Raharja belum sepenuhnya efisien dan efektif. Permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan yaitu dikarenakan kegiatan penerimaan IWPU (iuran wajib pesawat udara) dan pengeluaran biaya administrasi belum efisien dalam menghasilkan penerimaan IWPU yang mengakibatkan pembebanannya melebihi ketentuan operasional. Hal tersebut terjadi karena direksi PT JR tidak cermat dan konsisten dalam menetapkan dan menerapkan ketentuan operasional biaya administrasi yang berlaku serta tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas kegiatan pengelolaan IWPU, khususnya pembebanan administrasi (IHPS BPK Semester 1, 2011:220), Bicara mengenai kualitas laporan keuangan PT jasa raharja atas BPK masih menemukan 13 kasus dengan nilai 193.989,60 (dalam juta rupiah) untuk pemeriksaan laporan keuangan PT jasa raharja (2005-2008) (IHPS BPK Semester1, 2011:220). Berdasarkan permasalahan tersebut maka berarti kualitas laporan keuangan PT Jasa Raharja masih belum maksimal.

Dalam berbagai penelitian membuktikan bahwa penerapan *Good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan antara lain penelitian Farid Maruf (2008) yang meneliti tentang Pengaruh penerapan *Good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada umumnya termasuk dalam kategori terpercaya, dan integritas laporan keuangan pada umumnya tinggi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap integritas laporan keuangan adalah 31%. Artinya sebesar 31% peningkatan integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003), untuk melihat integritas laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan independensi auditor, mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian dari Jama'an (2008) pengaruh mekanisme *corporate governance*, dan kualitas kantor akuntan publik terhadap integritas informasi laporan keuangan (studi pada perusahaan publik di bej) hasil penelitian menunjukan semua variabel bebas berpengaruh terhadap Integritas laporan keuangan.

Maka berdasarkan latar belakan dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus-kasus manipulasi skandal laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN, sehingga masyarakat masih meragukan kualitas laporan keuangan BUMN.
2. Pelaksanaan kegiatan pada PT Jasa Raharja belum sepenuhnya efisien dan efektif, hal ini berarti penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* belum sepenuhnya terlaksanakan.
3. BPK masih menemukan 13 kasus dengan nilai 193.989,60 (dalam juta rupiah) untuk laporan Keuangan PT jasa Raharja tahun 2005-2008.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan yang telah disusun maka masalah dalam penelitian ini dapai dirumuskan yaitu apakah penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meguji apakah penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengetahuan dan informasi bagi perusahaana.

Manfaat teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti ataupun pengguna penelitian untuk referensi awal kepada para manajer perusahaan, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka acuan bagi peneliti lain untuk penelitian pengembangan lebih lanjut pada masa mendatang.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good corporate governance* (GCG)

2.1.1.1. Pengertian *Good corporate governance* (GCG)

Good corporate governance (GCG) sendiri merupakan sebuah konsep yang populer dan merupakan sebuah istilah dan gerakan yang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah konsep yang paling populer, GCG ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Di kalangan bisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan. Beberapa Negara mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Isu *corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Hastuti, 2005: 3).

Salah satu upaya pemantauan dan pengendalian ini, menurut ariyoto dkk. (2000) dalam Indriawati (2010: 11), dibutuhkan *good governance* dan GCG. *Good corporate governance* sendiri merupakan kelanjutan dari teori agensi yang

dalam tataran empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat penyelenggaraan perusahaan modern dimana terdapat ciri menonjol terpisahnya kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana dari para pesaham. Juga keterkaitan berbagai variabel turut mempersulit posisi teori agensi sebagai teori yang aplikasi.

Governance diambil dari kata latin, yaitu *governance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* yang artinya sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan. Ada beberapa definisi yang berkaitan dengan *good corporate governance* menurut *Sheilefer dan Vishny* di jelaskan bahwa *good corporate governance* sebagai bagian dari cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.

Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika Indriawati (2010: 12).

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh *Shleifer and Vishny* (1997) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah

ditanam. Indriawati (2010: 12) menyatakan bahwa corporate governance merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. Selain itu corporate governance merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (atau insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau shareholder). *Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Pengertian *Good corporate governance* menurut Mas Achmad Daniri (2005: 8), mengemukakan bahwa pengertian *Good corporate governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Sedangkan definisi *Good corporate governance* menurut Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (2006) sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham kepentingan intern dan ekstern

lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dan atau kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Good corporate governance* merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good corporate governance*.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG)

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Habibie (2012: 16) adalah sebagai berikut:

1) *Fairness* (Kewajaran).

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat

pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *equal job opportunity*.

2) *Disclosure and transparency* (Pengungkapan dan Transparansi).

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3) *Accountability* (Akuntabilitas).

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (*Financial Statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi "*Risk-based*" Audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan; penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi); menggunakan *External Auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

4) *Responsibility* (Responsibilitas).

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial;

menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, merupakan roh dari setiap perusahaan, artinya prinsip tersebut sebagai dasar dalam mengelola perusahaan untuk melaksanakan aktivitas dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Disamping itu, dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang bisa dipetik antara lain (Habibie, 2012: 19):

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat.
- b. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh Direksi (*agency cost*) dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
- c. Meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya meningkatkan pula *value* saham perusahaan.
- d. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula *shareholders's value* dan dividen.
- e. Praktek *good corporate governance* menempatkan karyawan sebagai salah satu *stakeholder* yang harus dikelola dengan baik sehingga akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
- f. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus meminimalkan cost akibat tuntutan *stakeholder* kepada perusahaan.

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut. Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan.

2.1.1.3 Tujuan *Good corporate governance* (GCG)

Pada dasarnya GCG diterapkan pada dua sektor yaitu pasar modal dan BUMN. Sedangkan tujuan penerapan GCG pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 pasal 4 (2007: 61) adalah:

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki budaya asing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong organ agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disektor BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian sosial.

5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi BUMN.

Agar penerapan *Good corporate governance* di BUMN dapat berjalan dengan baik, maka dilingkungan manajemen perlu dilengkapi beberapa perangkat atau polis, antara lain perjanjian penunjukan anggota direksi. Apabila beberapa perangkat dilingkungan manajemen serta dewan komisaris telah dilengkapi maka diharapkan penerapan *Good corporate governance* di BUMN akan lebih lancar dan sukses. Dengan demikian penerapan *Good corporate governance* secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan yang ada, dan memberikan *value creation* semua pihak yang terkait dengan perusahaan.

Menurut Indra Surya (2006: 68) penerapan *Good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Prinsip *Good corporate governance* sebagai *Governance* sistem yang dapat diterima masyarakat investor merupakan keharusan dalam sistem ekonomi yang

bertumpu pada kompetisi pasar dengan tuntutan efisiensi dan profitabilitas, secara legal dibutuhkan hukum yang mendukung penerapannya.

2.1.2 Laporan Keuangan

Akuntansi sering disebut sebagai *Universal Language of Business*. sebutan tersebut tidak berlebihan mengingat akuntansi sumber informasi utama yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakai informasi tersebut. Akuntansi memiliki arti sebagai komunikasi sosial dan mencakup arus informasi. Agar menjadi efektif, penerima informasi tersebut harus dapat mengerti isi atau pesan yang terkandung dalam informasi tersebut.

Setiap perusahaan yang melakukan proses akuntansi akan mengakhiri proses tersebut pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun oleh manajemen perusahaan sebagai alat komunikasi yang dimaksud diatas untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal perusahaan.

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan ringkasan dari peristiwa-peristiwa dan kewajiban yang bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dengan uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari kejadian tersebut. Setiap transaksi dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa, laporan akhirpun disajikan dalam nilai uang.

Dalam hal ini adapun beberapa pengertian mengenai laporan keuangan antara lain sebagai berikut Menurut Kusnadi (2002: 2), Definisi Laporan Keuangan adalah Suatu daftar keuangan yang dibuat pada akhir periode yang

berasal dari catatan aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan laporan perusahaan modal.

Sedangkan Menurut Munawir (2002: 5), Definisi Laporan Keuangan adalah pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan modal dimana neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber-sumber penggunaan dana atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan modal.

Dengan melihat beberapa pengertian laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan tentang posisi keuangan, tentang hasil operasi perusahaan, dan tentang perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan. Dimana nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004: 2), Yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari transaksi keuangan yang dibuat pada akhir periode dimana didalamnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas dan laporan perubahan modal yang digunakan untuk berbagai tujuan. laporan keuangan tersebut merupakan sebagai alat pihak manajemen untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Sedangkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, PSAK menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan format non keuangan.

Pada PSAK No.1 tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum dirumuskan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan

arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka menetapkan keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewadership*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Sedangkan Chapter 4 of APB *Statement* no.4, *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises* (2004) mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan kedalam tiga bentuk, yaitu :

1. Tujuan utama (*Particular Objectives*)
2. Tujuan Umum (*General Objectives*)
3. Tujuan kualitatif (*qualitative Objectives*)

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan utama (*Particular Objectives*) :

Menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan.

2. Tujuan Umum (*General Objectives*) :

Menyediakan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya dan kewajiban perusahaan, mengenai perubahan dalam sumber daya bersih yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan yang menguntungkan, untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi laba potensial perusahaan, untuk menyediakan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban, serta untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan bagi kebutuhan pengguna laporan.

3. Tujuan kualitatif (*qualitative Objectives*) :

Mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat dibuktikan netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi para pengguna informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004: 14), tujuan para pemakai laporan keuangan. Sebagai berikut :

Tujuan laporan keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan.
2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
3. Merupakan laporan pertanggung-jawaban manajemen.

2.1.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, informasi laporan keuangan harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik kualitatif tertentu. Karakteristik kualitas laporan keuangan yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2004: 7), adalah Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.

Adapun pokok tujuan kualitatif dari suatu laporan keuangan yaitu : relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan lengkap. Menurut IAI yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2004: 5), Karakteristik Laporan Keuangan terdiri dari empat, yaitu :

1. Dapat dipahami.
2. Relevan.
3. Keandalan.
4. Dapat diperbandingkan.

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar, namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dalam mempertimbangkan relevansi daripada informasi yang bertujuan umum, perhatian difokuskan pada kebutuhan umum pemakai, dan bukan kebutuhan khusus pihak-pihak tertentu, dengan demikian, suatu informasi mungkin mempunyai tingkat relevansi yang tinggi untuk kegunaan khusus tertentu, sementara kecil sekali relevansinya bagi kegunaan yang lain.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*Reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan. Informasi mungkin relevan jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keandalan informasi dapat dipengaruhi oleh :

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Terdapat resiko penyajian yang timbul tanpa disengaja, tetapi karena kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa yang dilaporkan, atau dalam menyusun dan menerapkan ukuran dan teknik penyajian sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*emission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan arena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat Diperbandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Berhubung pengguna ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.1.3 Hubungan Prinsip-prinsip *Good corporate governance* dengan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan elemen utama bagi terwujudnya prinsip-prinsip *Good corporate governance*, salah satunya yaitu prinsip *accountability*, didalamnya terkandung kewajiban perusahaan untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dibidang administrasi keuangan secara transparan dan wajar kepada pihak yang berkepentingan. Dan merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif, dengan dibentuknya komite audit. Komite audit mempunyai tugas utama melindungi pemegang saham ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan kualitas dalam laporan keuangan, laporan operasional serta parameter yang

digunakan untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut (Ririn, 2011).

Menurut Sekar Mayangsari (2003), menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan elemen utama bagi terwujudnya *Corporate Governance*. Dan kegagalan-kegagalan dalam mewujudkan *Corporate Governance* dapat dikurangi dengan adanya sistem pelaporan keuangan yang memadai. Sehingga *Corporate Governance* secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan laporan keuangan yang dituntut mempunyai kualitas, dimana kualitas laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* dan kualitas laporan keuangan. Dimana laporan keuangan merupakan elemen utama bagi terwujudnya *Corporate Governance*. Dan implementasi prinsip *Good corporate governance* merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*. Diharapkan dapat menghasilkan integritas didalam informasi laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang pernah dilakukan diantaranya ada yang membuktikan bahwa *Good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seperti dalam penelitian Astria

(2011) membuktikan *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. penelitian Jamaan (2008) yang penelitiannya juga membuktikan *corporate governance* dan kualitas kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Penelitian ini mengindikasikan *corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan.

2.2. Tinjauan Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan laporan keuangan diantaranya: Farid I maruf (2008), dalam penelitiannya tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (gcg) terhadap integritas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan elemen utama bagi terwujudnya *Corporate Governance*. Dan kegagalan-kegagalan dalam mewujudkan *Corporate Governance* dapat dikurangi dengan adanya sistem pelaporan keuangan yang memadai. Sehingga *Corporate Governance* secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan laporan keuangan yang dituntut mempunyai integritas Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG) terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan non financing yang mengikuti survey *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2008. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa

penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG) pada umumnya termasuk dalam kategori terpercaya, dan integritas laporan keuangan pada umumnya tinggi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG) terhadap integritas laporan keuangan adalah 31%. Artinya sebesar 31% peningkatan integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG) sementara sisanya (69%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG).

Pancawati Hardiningsih (2010), pengaruh independensi, *corporate governance*, dan kualitas audit Terhadap integritas laporan keuangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial signifikan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sementara komite audit, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Peran komite audit ternyata belum efektif dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Komisaris independen ternyata juga belum bisa berperan dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan penempatan dewan komisaris hanya sekedar memenuhi regulasi, sehingga belum bisa menegakkan *Good corporate governance*.

Penelitina Astria (2011) membuktikan *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer (Shleifer dan Vishny, 1997) dalam Jaman (2008).

Sementara itu, audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Jaman (2008) yang penelitiannya juga membuktikan *corporate governance* dan kualitas kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Penelitian ini mengidikasi *corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Evans et al., (2002) dalam Jaman (2008) menguji hubungan antara struktur *corporate governance* dan penurunan kinerja perusahaan dengan sampel perusahaan di Australia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan terhadap penurunan kinerja perusahaan dala artian semakin rendah penerapan *corporate governance* maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
sri rizky oktaviani wahab	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Neraca (X_1), Laporan Laba Rugi (X_2), Laporan Perubahan Ekuitas (X_3), Laporan Arus Kas (X_4) dan Catatan atas Laporan Keuangan (X_5) berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y) dan hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel Neraca (X_1), Laporan Laba Rugi (X_2), Laporan Perubahan Ekuitas (X_3), Laporan Arus Kas (X_4) dan Catatan atas Laporan Keuangan (X_5) berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama neraca, laporan laba

			<p>rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (Kualitas Penyajian Laporan Keuangan) sebesar 99.4% sedangkan sisanya 0.6% dipengaruhi oleh faktor lain. Langkah yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan yaitu perusahaan harus lebih memperhatikan cara penyusunan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah diterapkan dan lebih mengoptimalkan penerapan standar akuntansi keuangan pada perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas</p>
Jamaan (2008)	<p>Pengaruh mekanisme corporate governance, Dan kualitas kantor akuntan public terhadap Integritas informasi laporan keuangan (studi pada perusahaan publik di bej)</p>	<p>Conservatism Score Index, corporate governance, public accountant quality, agency theory, and signaling theory</p>	<p>Hasil pengujian berhasil membuktikan bahwa corporate governance dan kualitas kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Penelitian ini mengidikasi corporate governance mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisa variabel moderating untuk proporsi kepemilikan institusional, kualitas kantor akuntan publik izin akuntan, audit brand name, dan spesialisasi industri auditor dan firm size (LNASSET) sebagai variabel kontrol. Sedangkan khusus dua klasifikasi spesialisasi industri auditor dan audit brand names (KAPA atau OAA) yang di proksi sebagai kualitas kantor akuntan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan dan mempunyai hubungan yang kuat, sehingga disimpulkan adalah variabel moderating.</p>
Pancawati Hardiningsih (2010)	<p>Pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit Terhadap integritas laporan keuangan</p>	<p>dependensi, Corporate Governance, kualitas audit, dan integritas laporan keuangan</p>	<p>2005 sampai 2008. Hasil temuan menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial signifikan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sementara komite audit, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Peran komite audit ternyata belum efektif dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Komisaris independen ternyata juga belum bisa berperan dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan penempatan dewan komisaris hanya sekedar memenuhi regulasi, sehingga belum bisa menegakkan <i>Good corporate governance</i>.</p>
Tia Astria (2011)	<p>Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, Dan Ukuran Kap Terhadap Integritas Laporan Keuangan</p>	<p>Kata Kunci : Integritas laporan keuangan, Audit Tenure, Corporate Governance, Ukuran KAP</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur corporate governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p>

Lucia Eirene (2010)	Pengaruh penerapan prinsip-prinsip <i>Good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan Perusahaan	<i>Good corporate governance</i> , Return On Assets dan Return On Equity	Hasil analisis regresi linier sederhana menyimpulkan bahwa <i>Good corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets, sehingga hipotesis ke-1 penelitian ini yang menyatakan bahwa <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap ROA (Return On Assets), tidak teruji kebenarannya. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity, sehingga hipotesis ke-2 penelitian ini yang menyatakan bahwa <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap ROE (Return On Equity), teruji kebenarannya.
---------------------	---	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Selama sepuluh tahun terakhir ini, praktek *Good corporate governance* menjadi isu yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Beberapa perusahaan di Indonesia mulai menyadari akan arti pentingnya *Good corporate governance* dan dimulai menerapkan praktek *Good Corporate* tersebut. Secara definitif, *Good corporate governance* adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika (Lucia, 2010) dalam Habibie (2012).

Konsep *Good corporate governance* muncul sebagai salah satu reaksi terhadap krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir. Dampak dari krisis tersebut banyak perusahaan berjatuh karena tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak di bangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat

Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini, menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau *Good corporate governance* dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi *stakeholders*.

Penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance*, diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, untuk mengukur hasil kinerja ini, banyak alat yang bisa digunakan oleh perusahaan, diantaranya adalah laporan keuangan (Lucia, 2010) dalam Habibie (2012).

Laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan merupakan salah satu sarana utama untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen perusahaan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. (Alvin Pane, 2005) dalam Astria (2011)

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang tercermin

dalam laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi perusahaan.

Salah satu informasi penting yang perlu disediakan oleh perusahaan atau informasi laporan keuangan ini sangat berguna bukan hanya untuk manajer, yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan keuangan perusahaan dalam satu periode, tetapi juga berguna bagi para investor dan *stakeholders* lainnya untuk melihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manajemen perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi laporan keuangan secara benar dan jujur. Sehingga informasi laporan keuangan yang disajikan memiliki integritas.

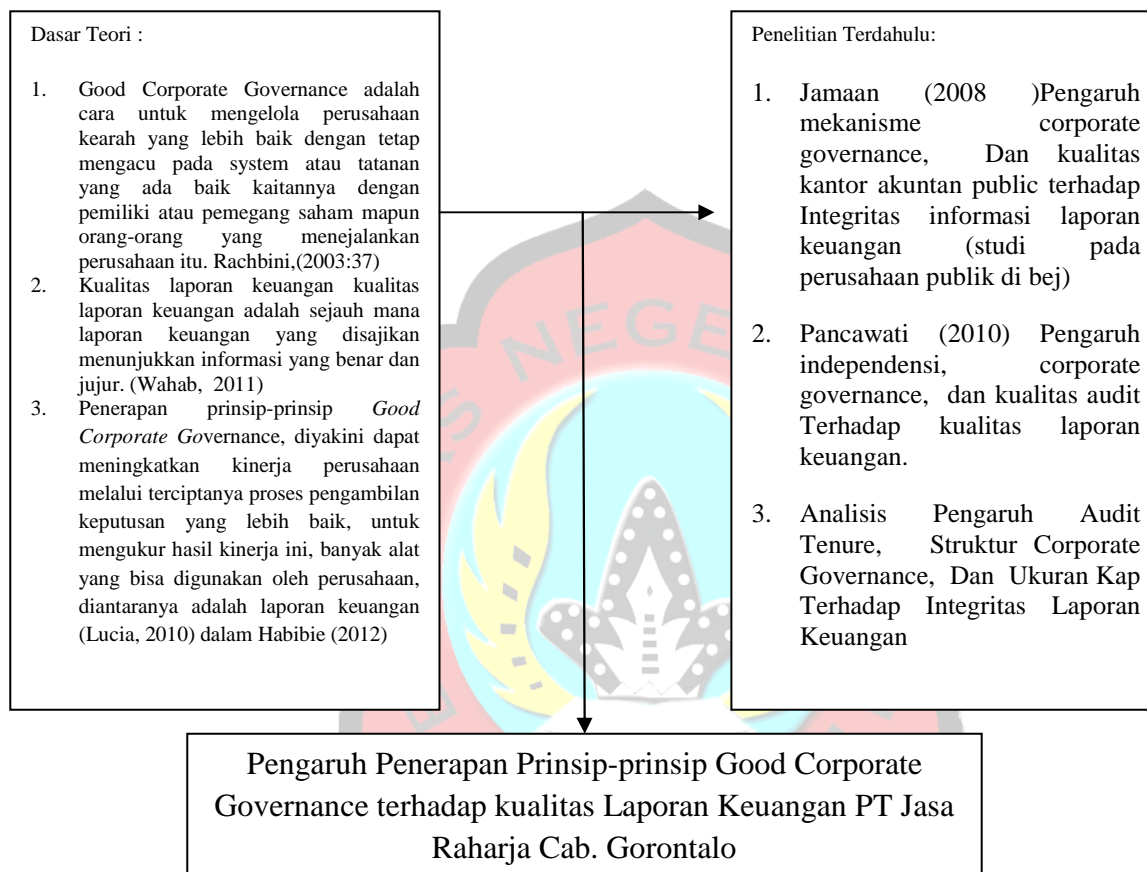
Menurut Mayangsari (2003) yang dikutip oleh Susiana dan Arleen Herawati (2007), integritas laporan keuangan adalah Sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, informasi laporan keuangan yang dihasilkan manajemen harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan angka dan deskripsi akuntansi.

Agar laporan keuangan dapat diandalkan, kualitas informasi yang terkandung didalamnya harus menjamin bahwa informasi wajar, bebas dari kesalahan. Jika seseorang tergantung pada informasi, sangat penting bagi informasi tersebut untuk dilaporkan secara jujur, fenomena yang dimaksudkan dari kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara

angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya (Wahab, 2011). Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan:

Gambar 1: Kerangka pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan pengujian secara empiris. Maka berdasarkan kerangka pemikiran di atas hipotesis sementara adalah diduga Penerapan Prinsip-prinsip *Good corporate governance* berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pt Jasa Raharja Cabang Gorontalo. Dengan pertimbangan peneliti sehingga memiliki lokasi tersebut adalah Belum ada penelitian yang sama di lokasi tersebut.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan, yakni mulai Maret s.d juni 2012. Untuk lebih jelasnya, schedule penelitian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Schedule Pelaksanaan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan I				Bulan II				Bulan III			
		Minggu				Minggu				Minggu			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Proposal	■											
2	Persiapan Penelitian		■										
3	Penelitian		■	■	■	■							
4	Pengolahan Data Penelitian					■	■						
5	Penyusunan Laporan Penelitian					■	■	■					
6	Bimbingan Hasil Penelitian						■	■	■	■	■		
7	Persiapan Seminar Hasil										■	■	

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian pada dasarnya menggambarkan prosedur-prosedur yang memungkinkan peneliti dapat menguji hipotesis penelitian, untuk dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang valid mengenai hubungan atau saling mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian tersebut.

Hubungannya dengan penelitian ini, maka Arikunto (2002:97) mengemukakan bahwa “variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas atau *independent variabel* (X), sedangkan variabel terikat disebut variabel tidak bebas, variabel terantung atau *dependent variabel* (Y)”. Berdasarkan teori ini, dapat dikemukakan bahwa *good corporate governance* sebagai variabel X mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai variabel Y (sesuai hipotesis penelitian), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :



Keterangan:

X = Good corporate governance

Y = Kualitas laporan keuangan

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Lebih jauh, Sudjana (1984:6) dalam bukunya metode statistika mengemukakan bahwa populasi “merupakan totalitas semua nilai yang mungkin dari hasil menghitung atau pengukuran, kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota perkumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”. Peneliti menetapkan bahwa yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian keuangan yang ada di lingkungan PT Jasa Raharja Cabang Gorontalo .

Menurut Arikunto (1991:102) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini total populasi adalah seluruh pegawai yang berada di PT Jasa Raharja Gorontalo yang berjumlah 35 orang. Sesuai dengan kebutuhan penelitian maka seluruh populasi yang ada digunakan sebagai sampel penelitian. Sudjana (1989:5) apabila jumlah populasi kurang dari 100 maka, yang menjadi sampel adalah keseluruhan dari populasi tersebut atau disebut sampel total. Sedangkan jumlah populasi lebih dari 100, maka yang menjadi sampelnya adalah 10%-15% atau 20%-25%. Dengan demikian peneliti mengambil keseluruhan pegawai menjadi sampel penelitian (jumlah total) Karena seluruh populasi diambil dari penelitian maka penelitian ini adalah penelitian sensus.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *good corporate governance* (X) dan Variabel dependen Kualitas laporan keuangan (Y). Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan:

1. Variabel bebas atau *dependent variabel* (X). *good corporate governance* adalah cara untuk mengelola perusahaan kearah yang lebih baik dengan tetap mengacu pada system atau tatanan yang ada baik kaitannya dengan pemilik atau pemegang saham mapun orang-orang yang menjalankan perusahaan itu (Rahbini, 2003). Variabel ini diukur dengan empat dimensi *good corporate*

governance yang diembankan oleh (FCGI, 2003) dan digunakan dalam penelitian dari setiawan, (2010) dan Habibi (2012) yaitu *Fairness, Discloser and transparency, accountability dan responsibility*.

2. Variabel terikat atau *dependent variabel* (Y). kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Varibel ini diukur dengan empat dimensi kualitas laporan keuangan dalm standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam penelitian Dukalang (2010) dan wahab (2011) yaitu laporan keuang yang berkualitas harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan harus dapat dipahami.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Varabel

Variabel	Definisi Varabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item pertanyaan
Good Corporate Governance (x)	cara untuk mengelola perusahaan kearah yang lebih baik dengan tetap mengacu pada system atau tatanan yang ada baik kaitannya dengan pemilik atau pemegang saham mapun orang-orang yang menjalankan perusahaan itu. Refrensi : Rachbini,(2003:37)	<i>Fairness</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat peraturan yang melindungi kepentingan minoritas dan kebijakan yang melindungi perusahaan; • Menetapkan peran dan tanggung jawab. • Menyajikan informasi secara wajar • melindungi kepentingan stakeholder; • Membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi 	Ordinal	1-5
		• <i>Disclosure dan transparency,</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan pengungkapan informasi keuangan • Keterbukaan dalam menyampaikan visi dan misi perusahaan • Keterbukaan kebijakan secara tertulis 	Ordinal	6-8
		• <i>Accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan yang efektif (<i>effective oversight</i>) • Pengelolaan perusahaan secara efektif • Konsistensi laporan keuangan • Menetapkan sistem penilaian kinerja 	Ordinal	9-12

		<i>Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; • menghindari penyalahgunaan kekuasaan; • menjadi profesional dan menjunjung etika; • memelihara lingkungan bisnis yang sehat. <p>(FCGI, 2003), setiawan, 2010, Habibi (2012)</p>	Ordinal	13-16
Kualitas laporan keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Refrensi : Wahab, 2011	Relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempengaruhi keputusan. 2. Memiliki umpan balik. 3. Memiliki manfaat produktif. 4. Tepat waktu 5. Lengkap 6. Bebas 	Ordinal	1-6
		Andal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas dari kesalahan material 2. Bebas dari pengertian yang menyesatkan 3. Jujur 4. Diverifikasi 5. Sesuai kebutuhan 	Ordinal	7-12
		Dapat Dibandingkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara periode sekarang dan periode sebelumnya 2. Perbandingan antara laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan lain. 	Ordinal	13-14
		Dapat Dipahami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipahami oleh pengguna. 2. Pengguna memiliki kemauan untuk mempelajari informasi keuangan. <p>Referensi: Christian Dukulang (2010), Refrensi : Wahab, (2011), SAK</p>	Ordinal	15-16

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari responden yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket. Angket adalah serangkaian pertanyaan indikator-indikator yang ada dalam fokus penelitian, pertanyaan-

pertanyaan tersebut mewakili semua bentuk aktivitas atau kegiatan dalam fokus penelitian. Teknik ini akan disediakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden yang telah ditentukan.

3.6 Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan pendekatan secara langsung kepada karyawan PT Jasa Raharja Cabang Gorontalo melalui angket.

3.7 Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006:124) bahwa instrument adalah alat untuk memperoleh data pada waktu peneliti menggunakan suatu metode. Dengan menggunakan suatu instrument yang valid dan reliable dalam pengumpulan, maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliable. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian mejadi valid dan reliable.

3.7.1 Uji Validitas Instrumen

Berkaitan dengan pengujian validitas instrument menurut Riduan (2005:109-110) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Untuk menguji validitas alat ukur, lebih dahulu dicari harga-harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.

Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan rumus pearson product moment adalah:

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{n \{ \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2 \} \{ n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2 \}}} \quad (\text{Arikunto, 2002:146})$$

Dimana:

R_{hitung} = Koefisien korelasi

$\sum X_i$ = Jumlah skor item

$\sum Y_i$ = Jumlah skor total (seluruh item)

N = Jumlah responden

Selanjutnya di hitung dengan uji-t dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{n-2} r}{1-r^2} \quad (\text{Arikunto, 2002:146})$$

t = Nilai t-hitung

r = Koefisien korelasi hasil r-hitung

n = Jumlah responden

distribusi (tabel t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n - k$) kaidah

keputusan: jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti Valid, sebaliknya $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak valid.

Jika instrument itu valid, maka dilihat criteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indeks Koefisien Korelasi

Nilai r	Tingkat Korelasi
0,000 – 0,199	Korelasi sangat rendah
0,200 – 0,399	Korelasi rendah
0,400 – 0,599	Korelasi sedang
0,600 – 0,799	Korelasi kuat
0,800 – 1,000	Korelasi sangat kuat

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrument

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauhmana kestabilan dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep. Selain itu pengujian reliabilitas dilakukan untuk membantu menetapkan kesesuaian pengukur. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan koefisien reliabilitas *Alpha cronbach* (Arikunto, 2006: 196) yaitu:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right] \quad (\text{Arikunto, 2006: 196})$$

Keterangan:

r^{11} : Reliabilitas instrumen

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$: Jumlah varians butir

σ_t^2 : Varians total

Nilai r_{hitung} akan dikonsumsikan pada nilai-nilai r_{tabel} dengan alpha 5 % (0,05). Apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keadaan sebagai alat ukur.

3.7.3 Transformasi Data

Varibel- variabel dalam penelitian ini sebagaimana tergambar operasionalisasi varibel menggunakan skala ordinal, sedangkan untuk menganalisis dalam penelitian ini diperlukan data dengan ukuran skala interval. Oleh karena itu seluruh variabel yang berskala ordinal ditransformasi menjadi data interval. Menurut Riduan & Akdon (2005:54) teknik transformasi yang digunakan adalah dengan menggunakan MSI (*Method of Succesive Interval*) dengan rumus sebagai berikut:

$$SV (\text{scale value}) = \frac{(\text{density at lower limit}) - (\text{density at upper limit})}{(\text{area under upper limit}) - (\text{density under lower limit})}$$

Keterangan:

- Density at lower limit : kepadatan batas bawah
- Density at upper limit : kepadatan batas atas
- Density under upper limit : daerah dibawah atas
- Density under lower limit : daerah dibawah batas bawah

3.8 Metode Analisis

3.8.1 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel terikat (Kualitas laporan keuangan) dan satu variabel independen (*Good*

Corporate Governance). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2009: 261) adalah:

$$Y = a + bX \quad (\text{Sugiyono, 2009: 261})$$

Y : Variabel dependen (Kualitas laporan keuangan)

X : Variabel independen (*Good Corporate Governance*)

b : Angka arah atau koefisien regresi

a : *Intercept* atau konstanta

Untuk kemudahan dalam perhitungan digunakan jasa computer berupa *software* dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) for windows version 16 dan *Microsoft excel 2007*.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linear sederhana, data tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki dalam analisis regresi yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Setelah mendapatkan data mengenai variabel-variabel penelitian, data tersebut diuji kenormalannya, apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Jika data yang diperoleh itu tidak terdistribusi dan variansinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dibuat dengan alat statistik nonparametrik.

Pengujian normalitas data dibuat dengan melihat grafik penyebaran data dan *kolmogorow-smirnov*. Jika tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data itu terdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

2. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping itu dengan pengujian linearitas pengujian diharapkan dapat mengetahui taraf signifikan penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variansnya berbeda maka dikatakan heteroskedastisitas, namun jika variansnya sama disebut homokedastisitas. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3 Koefisien Determinasi

Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dibuat pengujian koefisien determinan. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

- Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsen, Fa. Sluuiters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.
- NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.
- NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.
- PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak berhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja' dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang

pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan pp No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan

kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. No.33 tahun 1964 dan UU. No.34 tahun 1964.

4.1.2 Gambaran Umum Responden

Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 35 responden. Dari 35 kuisioner yang disebarkan, semuanya kembali, pengisian data pribadi dan jawaban tidak lengkap sebanyak 6 buah, yang diisi lengkap dan dapat diolah sebanyak 29 buah. Data demografi responden dalam tabel di bawah ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Tabel berisi informasi yang disajikan, antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja.

Tabel 4.1: Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	10 orang	34.48%
2. Perempuan	19 orang	65.52%
Usia		
1. < 30 tahun	7 orang	24.13 %
2. 30 – 40 tahun	17 orang	58.62 %
3. 40 – 50 tahun	1 orang	3.45 %
4. > 50 tahun	4 orang	13.79%
Tingkat Pendidikan		
1. S2	2 orang	6.89 %
2. S1	11 orang	37.93%
3. D3	8 orang	27.58 %
4. D1	- orang	0%
5. SMA	8 orang	27.58 %
Masa Kerja		
1. 1-2 tahun	- orang	0%
2. 2-4 tahun	5 orang	17.24 %
3. 4-6 tahun	14 orang	48.27 %
4. 6-10 tahun	10 orang	21.42 %
5. > 10 tahun	- orang	-

Sumber: Data diolah

Berdasarkan jenis kelamin responden terdiri 34.48% laki-laki dan 65.52% perempuan, dilihat dari usia responden dapat diketahui bahwa yang berusia kurang dari 30 tahun adalah 24.13%, usia 30 sampai 40 tahun 58.62%, usia 40 sampai 50 tahun 3,45% dan yang berusia diatas 50 tahun 13,79%. dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 33.93 %, S2 sebesar 6.89%. Kemudian mereka yang berpendidikan SMA dan D3 masing-masing sebanyak 27.58%. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa yang memiliki masa kerja 6-10 tahun sebanyak 21.42 %, yang memiliki masa kerja 2-4 tahun 17.24 % dan yang memiliki masa kerja 4-6 tahun sebesar 48,27%.

4.2 Uji Kualitas Instrumen

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisisioner, untuk itu perlu dilakukan pengujian kualitas instrumen. Dalam pengujian kualitas instrumen ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut:

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pernyataanpertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah dalam penelitian ini sudah dapat mengukur variabel penelitian.

Uji validitas butir-butir kuesioner penelitian dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Product Moment Pearson*. Pengujian

validitas tiap butir dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total responden yang merupakan jumlah skor tiap butir. Selanjutnya, dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r_{tabel} (tabel *r product moment*) dengan nilai r_{hitung} , dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 29 orang, maka angka kritis dari r_{tabel} (tabel *r product moment*) yang didapat adalah sebesar 0,367 jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan tersebut valid, nilai r_{tabel} dapat dilihat pada lampiran. Hasil pengujian validitas instrumen tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2: Hasil Uji Validitas Variabel X (*Good corporate governance*)

Dimensi	Pertanyaan	Nilai-r hitung	Nilai r tabel (n=29,α=5%)	Kesimpulan
Fairness	1	0.796	0.367	Valid
	2	0.577		Valid
	3	0.599		Valid
	4	0.629		Valid
	5	0.792		Valid
Disclouser and transparency	6	0.876	0.367	Valid
	7	0.934		Valid
	8	0.929		Valid
Accountability	9	0.416	0.367	Valid
	10	0.804		Valid
	11	0.785		Valid
	12	0.679		Valid
Responsibility	13	0.733	0.367	Valid
	14	0.801		Valid
	15	0.684		Valid
	16	0.572		Valid

Sumber : Hasil Olah Data 2012

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0.367. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel x (*Good corporate governance*) valid.

Tabel 4.3: Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)

Dimensi	Pertanyaan	Nilai-r hitung	Nilai r tabel (n=29,α=5%)	Kesimpulan
Relevan	1	0.728	0.367	Valid
	2	0.714		Valid
	3	0.481		Valid
	4	0.822		Valid
	5	0.794		Valid
	6	0.902		Valid
Keandalan	7	0.790	0.367	Valid
	8	0.756		Valid
	9	0.542		Valid
	10	0.716		Valid
	11	0.894		Valid
Dapat Dibandingkan	12	0.756	0.367	Valid
	13	0.622		Valid
Dapat dipahami	14	0.716	0.367	Valid
	15	0.894		Valid

Sumber : Hasil Olah Data 2012

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0.367 Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Y (kualitas laporan keuangan) valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini berdasarkan nilai alpha, jika nilai alpha sama dengan atau melebihi 0,60 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya apabila nilai alpha kurang dari 0,60 pernyataan variabel tersebut tidak reliabel. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
<i>Good corporate governance</i> (X)	0.765	Reliabel
Kualitas laporan keuangan (Y)	0.768	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel *Good corporate governance* dan kualitas laporan keuangan memiliki status reliabel.

4.3 Transformasi Data

Data mengenai variabel-variabel penelitian yang terkumpul melalui kuesioner adalah data yang berskala ordinal, sedangkan syarat untuk dapat digunakan untuk regresi sederhana sebagai analisis utama dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data ordinal yang dikumpulkan selanjutnya dijadikan data interval melalui *method successive intervals* (MSI).

Hasil MSI untuk setiap item Pertanyaan dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran untuk memudahkan dalam melakukan transformasi data ordinal ke Interval digunakan bantuan Program Aplikasi MSI dengan Ms.Exel 2007.

4.4 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Adapun pengujian asumsi klasik meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal. Uji normal data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *kolmogorov-smirnov*. Jika tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka data itu terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. Dalam penelitian ini memperoleh tingkat signifikansi lebih dari 0,05, hal ini berarti data penelitian berdistribusi normal. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan Program SPSS versi 16. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas:

Tabel 4.5: Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		penerapan good corporate governance	kulitas laporan keuangan
N		29	29
Normal Parameters ^a	Mean	44.1892	41.2885
	Std. Deviation	10.87477	10.28248
Most Extreme Differences	Absolute	.100	.139
	Positive	.096	.082
	Negative	-.100	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		.538	.750
Asymp. Sig. (2-tailed)		.935	.626
a. Test distribution is Normal.			
Sumber: hasil Olah data 2012			

2. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk menguji linearitas hubungan variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dikatakan linear jika tingkat signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa F sebesar 4.080 dengan signifikansi 0,535 (lebih dari 0,05) hal ini berarti model regresi linear. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6: Uji Linieritas

ANOVA Table

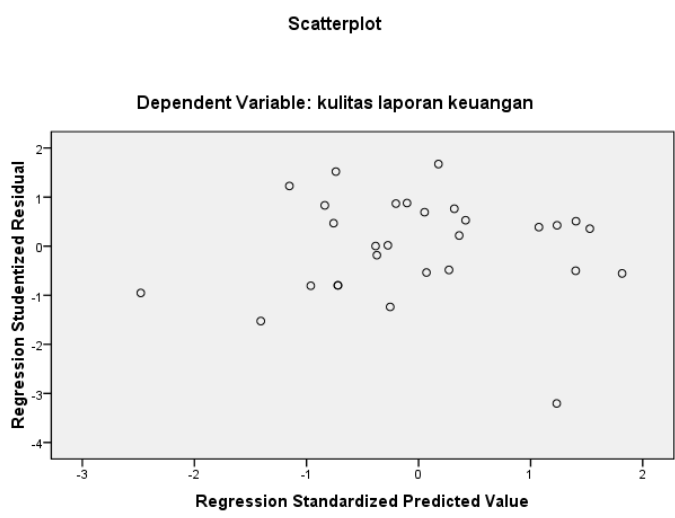
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
kualitas laporan keuangan * penerapan good corporate governance	Between Groups (Combined)	3250.259	19	171.066	17.012	7.310
	Linearity	2511.853	1	2511.853	249.798	7.159
	Deviation from Linearity	738.405	18	41.023	4.080	.535
Within Groups		90.500	9	10.056		
Total		3340.759	28			

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Tujuan pengujian ini untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik dalam grafik tersebut membentuk pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas, namun jika

titik-titik dalam grafik tersebut menyebar tanpa membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan alat bantu SPSS, yang hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Hasil Uji heroskedastisitas



Pada gambar di atas nampak bahwa titik tersebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi sederhana. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesis adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk masing-masing koefisien regresi. Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka hipotesis nol (H_0) atau ditolak. Dan apabila t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka H_0 atau diterima. Selain kriteria perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , juga digunakan kriteria nilai p value (kekuatan koefisien regresi dalam menolak H_0). Jika p value $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan apabila p value $> 0,05$ maka H_0 diterima. Hasil Pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7 Model Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1.(Constant)	9.297	5.321		1.747	.092
penerapan good corporate governance	.724	.117	.766	6.185	.000

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber olah data 2012

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi dapat dibentuk yaitu :

$$Y = 9.297 + 0.724x$$

Model regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa koefisien regresi Variabel X (penerapan *good corporate governance*) diperoleh sebesar 0.724 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa *penerapan good*

corporate governance yang lebih baik dapat meningkatkan kulaitas laporan keuangan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kulaitas laporan keuangan memiliki signifikan 0.000 (di bawah $\alpha = 0,05$). Dengan membandingkan t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 1.703 (nilai t Tabel) dan t_{hitung} pada $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 6.165 yang berarti bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka ini berarti terdapat pengaruh positif penerapan *good corporate governance* terhadap kulaitas laporan keuangan pada PT Jasa Raharja Cabang Gorontalo.

Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.586	.571	6.73545

a. Predictors: (Constant), penerapan good corporate governance

Sumber: Hasil olah data 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi atau angka *R Square* adalah sebesar 0.586. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (*Good corporate governance*) dapat menjelaskan variabel dependen (kualitas laporan keuangan) sebesar 58.6%. Hal ini berarti sebesar 58.6% *Good*

corporate governance mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 41.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji. Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah penerapan standar akuntansi keuangan, independensi, dan audit internal. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu oleh Wahab (2011) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dan juga penelitian dari Pancawati Hardiningsih (2010) tentang pengaruh independensi, *corporate governance*, dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi sederhana diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian dengan menggunakan uji-t yang memberikan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Koefisien regresi sebesar 0,742 menunjukkan bahwa bentuk pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan adalah positif. Setiap peningkatan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,742 satuan.

Adapun besar pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 58,6% sedangkan sisanya sebesar 41,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil koefisien determinasi ini

terlihat bahwa walaupun pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sudah cukup besar, namun pengaruh dari variabel lain juga cukup dominan yakni mencapai 41,4%. Ini berarti bahwa selain penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* masih banyak hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya penerapan standar akuntansi keuangan, independensi, dan audit internal.

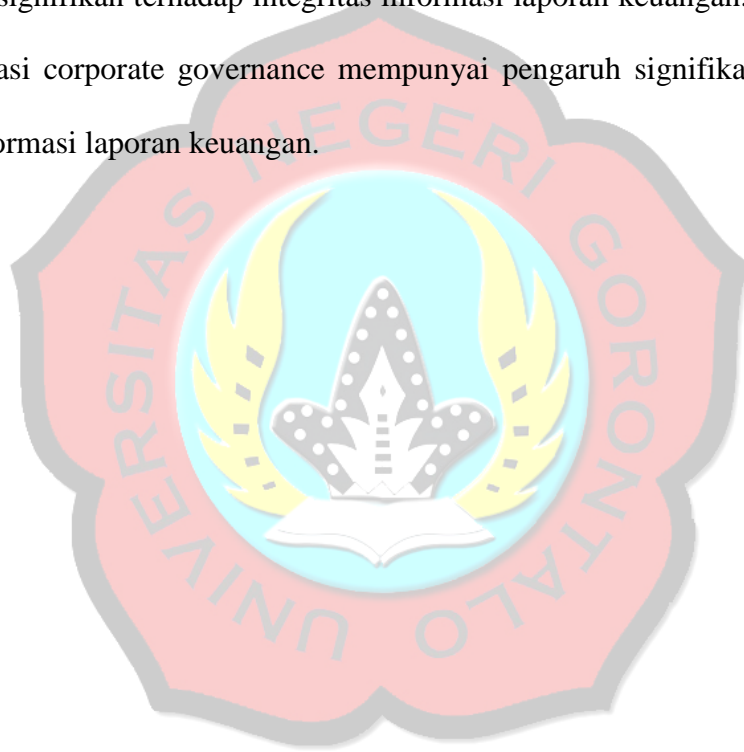
Penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance*, diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, untuk mengukur hasil kinerja ini, banyak alat yang bisa digunakan oleh perusahaan, diantaranya adalah laporan keuangan (Lucia, 2010) dalam Habibie (2012).

Laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan merupakan salah satu sarana utama untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen perusahaan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. (Alvin Pane, 2005) dalam Astria (2011)

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ririn (2011) dan juga teori dari (Lucia, 2010) yang dikutip oleh Habibie (2012) Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik,

untuk mengukur hasil kinerja ini, banyak alat yang bisa digunakan oleh perusahaan, diantaranya adalah laporan keuangan.

Penelitian ini membuktikan beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian Astria (2011) yang membuktikan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. penelitian Jamaan (2008) juga membuktikan *corporate governance* dan kualitas kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Penelitian ini mengidikasi *corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Jasa Raharja Cabang Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Nilai R^2 sebesar 0.586 atau 58.6% berarti kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh *Good corporate governance* dan sisanya sebesar 41.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain *Good corporate governance* merupakan faktor penting yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian ini, penulis memberikan saran bagi PT Jasa Raharja diharapkan dapat lebih memperhatikan *Good corporate governance* karena *Good corporate governance* merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. terutama pada prinsip transparansi, Karena dari keempat prinsip *Good corporate governance* tersebut prinsip transparansi merupakan prinsip yang paling sulit diterapkan oleh perusahaan. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan

keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan masih belum terbuka dalam hal keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bisa mengancam daya saing.



DAFTAR PUSTAKA

- Astria, Tia. 2011. *Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, Dan Ukuran Kap Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Skripsi UNDIP.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).2000. *Akuntabilitas dan Good Corporate Governance*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, per 1 April 2004. Jakarta : Salemba Empat.
- Deni Darmawati, Khomsiyah, dan Rika Gelar Rahay, 2005. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, vol.8, hal. 65-81.
- Evans, John, Robert Evans dan Serena Loh. 2002. *Corporate Governance and Declining Firm Performance*. *International Journal of Business Studies* (June): 1-18.
- Faridl Maruf, 2008. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Integritas Laporan Keuangan*
- Jam'an. 2008. *Analisis pengaruh audit tenure, Struktur corporate governance, dan Ukuran kap terhadap integritas Laporan keuangan*. Tesis universitas diponegoro.
- Jumingan.2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hardiningsih. Pancawati. 2010. *Pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit Terhadap integritas laporan keuanga*. *Kajian Akuntansi*, Pebruari 2010, Hal: 61 - 76 ISSN : 1979-488
- Habibie, Miranda, *Pengaruh penerapan Good Governance Terhadap Kinerja perusahaan* (Studi di Pegadaian syariah Gorontalo). Skripsi S1. Akuntansu UNG.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006. *Penerapan Good Corporet Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Uasaha*. Jakarta : kencana.
- Indriawati, Rani, 2010. *Pengaruh Penerapan Praktik Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Skripsi UNIKOM

Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober*
 2004. Penerbit Salemba Empat. Jakarta;

..... 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit PT. Salemba
 Empat Jakarta

Mayangsari. Sekar. *Pengaruh Keahlian audit dan Independensi terhadap pendapat audit: sebuah kuasi eksperimen*. Jurnal riset akuntansi Indonesia vol. 6. No. 1, Januari 2003.

Moh. Wahyudin Zarkasyi. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung : Alfabeta.

Muh. Arief Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka, 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Unhas Makasar : Simposium Nasional Akuntansi X.

Mas Achma Damiri, 2005. *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance Dalam konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia.

Munawir, 2004. *Analisa Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Siregar. Sylvia & Sidharta Utama. *Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek Corporate Governance terhadap pengelolaan laba (Earnings Management)*. Jurnal riset akuntansi Indonesia.

Sedarmayanti. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung : Mandar Maju.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Susiana, Arleen Herawati. 2007. *Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X.

YPPMI Institut dan FCGI. 2002. *Good Corporate Governance dalam Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. YPPMI Sinergy Communication.

www.governance-indonesia.com

www.sinarharapan.co.id

Wahab Sri Rizky. 2011. *Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

Zaki Baridwan. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Hastuti, theresia dwi. *Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta)* Unika Soegijapranata

Shleifer, A. dan R.W. Vishny. (1997). *A Survey of Corporate Governance*. *Journal of Finance*, Vol.52. No.2. Juni, hal.737-783.

